

**HUBUNGAN BELANJA MODAL DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
(Studi Kasus Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan)**

Oleh
Baihaqi
Husnul Khotimah

ABSTRACT

This research aims to give an empirical evidence about the connection between capital expenditure and maintenance expenditure in Sumbagsel Government of Regency/Municipality, and whether in regency areas are higher than municipality in Sumbagsel areas. The source of data analysis come from APBD Realization report of regency & municipality in Sumbagsel area.

The analysis found that, overall, capital expenditures of 2005 and 2006 had a significance correlation with maintenance expenditure, in regency and municipality Government. Only one test didn't show correlation that is between capital expenditure 2005 and maintenance expenditure 2006 in regency area which is amounting to 0.037.

The correlation of capital expenditure & maintenance expenditure between regency/municipality government in Sumbagsel area was not different significantly in 2005 and 2006 which is proved by $R^2 < t\text{-table} = 1,746$. This invention means, there is a group of regency/municipality area which is rich and poor in Indonesia and this condition was caused by a different potention of nature resources in that regency/municipality.

Keyword: capital expenditure, maintenance expenditure.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam APBD adalah sebagai berikut: (1) rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci; (2) sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; (3) jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; (4) periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun anggaran adalah pendekatan *line item* atau pendekatan tradisional. Menurut Arif, dkk. (2001), cara penyusunan anggaran dilakukan dengan merinci jenis pendapatan dan belanja (*nature* atau *object*). Jadi, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran (Halim, 2004). Daerah harus memiliki wewenang dalam merencanakan, menggunakan, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah melalui DPRD tanpa adanya intervensi Pemerintah Pusat seperti di masa lalu. DPRD juga memiliki peran penting dalam mengontrol kinerja Pemerintah Daerah guna terbentuknya transparansi anggaran sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik. Tujuan dari anggaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan publik dalam pengadaan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara gratis oleh pemerintah daerah. Namun dikarenakan adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, sering berakibat terdistorsinya alokasi belanja modal dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten sangat berpengaruh dalam terciptanya pemerintahan yang bersih dan sehat, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi tepat sasaran. Mardiasmo (2002) menyatakan, dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Menurut Dwiyanto, *et.al.* (2003), masalah otonomi daerah yang muncul diantara kabupaten dan kota adalah dengan asumsi keduanya memiliki praktik-praktik manajemen pemerintahan pelayanan publik, dan pembangunan yang berbeda sebagai akibat perbedaan kondisi geografis, karakteristik ekonomi, dan ciri-ciri sosial budaya penduduknya.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Jenis-jenis belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan, aset tak berwujud, gedung dan bangunan, dan lain-lain.

Di negara Indonesia, proses pengelolaan keuangan daerah, anggaran daerah, dan setiap realisasi kebijakan yang berhubungan dengan *cost* atau belanja (*expenditure*) harus berlandaskan pada peraturan resmi dari pemerintah yang biasa disebut peraturan daerah. Peraturan ini merupakan acuan bagi pengelola keuangan daerah untuk menentukan apakah suatu pengeluaran dana atau kas untuk mengeluarkan biaya-biaya, baik berupa aset tetap (belanja modal) dan juga biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap tersebut boleh dilakukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab, disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan pada peraturan daerah. APBD juga harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Bastian, 2001). Diharapkan dengan adanya anggaran guna mendapat aset tetap dan juga pendanaan untuk memelihara aset, maka pelaksanaan berbagai aktivitas dalam melayani kepentingan publik dapat lebih lancar dan terarah.

Selama ini di dalam paradigma masyarakat, kota biasanya selalu memiliki anggaran belanja yang lebih besar daripada kabupaten. Padahal kenyataan yang terjadi dewasa ini, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, kabupaten-kabupaten (pemekaran) di berbagai propinsi di Indonesia khususnya wilayah Sumbagsel mulai bermunculan. Biasanya kabupaten yang baru bermunculan ini berlomba-lomba untuk membangun wilayahnya, salah satunya dengan cara mengalokasikan belanja modal dan juga belanja pemeliharaan dalam jumlah yang relatif besar (karena Pemkab harus merintis dari awal) yang dimasukkan dalam APBD guna melengkapi pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Apakah belanja modal berhubungan dengan belanja pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Sumbagsel?
- Apakah belanja modal tahun sebelumnya (2005) berhubungan secara signifikan dengan belanja pemeliharaan tahun berikutnya (2006) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Sumbagsel?
- Apakah terdapat perbedaan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Sumbagsel?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara alokasi belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumbagsel.
- b. Untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan belanja modal tahun sebelumnya (2005) dengan belanja pemeliharaan tahun berikutnya (2006) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Sumbagsel.
- c. Untuk memberikan bukti empiris apakah hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah kota berbeda dibandingkan kabupaten di wilayah Sumbagsel.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberi kontribusi empiris untuk memperkuat penelitian sebelumnya, terkait adanya hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan yang diteliti pada pemerintah kabupaten/kota di Wilayah Sumbagsel.
- b. Memberi Kontribusi kebijakan, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Legislatif dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD serta UU dan PP yang menyertainya.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini pada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota se Sumbagsel) dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005-2006. Pembatasan tahun anggaran dilakukan karena pada tahun yang bersangkutan, APBD telah disusun dengan menggunakan format sesuai Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 sehingga dapat diperbandingkan.

II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia yang dibahas dan setuju secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 Pasal 15 Ayat (3), APBD mempunyai fungsi yaitu :

- a. Fungsi Otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- f. Fungsi Stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintahan daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pada tahap perencanaan anggaran, daerah sangat membutuhkan aparat (eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas, mempunyai visi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang terpuji sehingga dapat mengelola dan memperjuangkan pembangunan daerah dengan baik. Pemerintah daerah harus berusaha melibatkan semua elemen yang ada di daerah, agar perencanaan pembangunan daerah dapat mencerminkan kebutuhan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Pedoman penyusunan APBD memuat, antara lain :

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan
- c. Teknis penyusunan APBD
- d. Hal-hal khusus lainnya.

Dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah kepada kepala daerah, yang paling lambat dilaksanakan pada awal bulan Juni setiap tahunnya.

Rancangan Kebijakan Umum APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas pada pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas berikutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

2.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Data belanja modal dan belanja pemeliharaan yang digunakan pada penelitian ini adalah data realisasi APBD dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, maka struktur APBD yang dibahas dalam penelitian ini masih mengacu pada Kepmendagri No.29 tahun 2002 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun format laporan APBD yang mengacu pada Kepmendagri No.29 Tahun 2002, dapat digambarkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian APBD	Rincian APBD
PENDAPATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba Usaha Daerah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus d. Dana Perimbangan dari Propinsi*) 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
BELANJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. APARATUR DAERAH <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Administrasi Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai/Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 2) Operasi dan Pemeliharaan <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai/Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 3) Belanja Modal 2. PELAYANAN PUBLIK <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Administrasi Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai dan Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai/Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 3) Belanja Modal 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka Surplus/Defisit

Bagian APBD	Rincian APBD
PEMBIAYAAN	1. Penerimaan Daerah 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 2) Transfer dari Dana Cadangan 3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 2. Pengeluaran Daerah 1) Transfer ke Dana Cadangan 2) Penyertaan Modal 3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

*) Untuk Kabupaten/Kota

Sumber : Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

2.3 Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi Anggaran merupakan pengungkapan dari kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan pada APBD, digambarkan dalam perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan (KSAP, 2005).

Unsur-unsur dari penyajian laporan realisasi anggaran antara lain adalah pendapatan, belanja, pembiayaan, transfer, surplus/defisit, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, dan lain-lain. Laporan perhitungan APBD ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasi pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

Tabel 2.2
LAPORAN PERHITUNGAN APBD

Bagian APBD	Rincian APBD	Anggaran 20x3	Realisasi 20x3	Lebih /krng
PENDAPATAN	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah			
BELANJA	1. APARATUR DAERAH 1) Belanja Administrasi Umum a. Belanja Pegawai/Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 2) Operasi dan Pemeliharaan a. Belanja Pegawai/Personalia b. Belanja Barang dan Jasa			

Bagian APBD	Rincian APBD	Anggaran 20x3	Realisasi 20x3	Lebih /kg
	c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 3) Belanja Modal 2. PELAYANAN PUBLIK 1) Belanja Administrasi Umum a. Belanja Pegawai dan Personalialia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan a. Belanja Pegawai/Personalialia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 3) Belanja Modal 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka Surplus/Defisit			
PEMBIAYAAN	1. Penerimaan Daerah 2. Pengeluaran Daerah			

*) Untuk Kabupaten dan Kota

Sumber : Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

2.4 Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Dalam Anggaran Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (http://www.mail-archive.com/perbendaharaanjateng/makalah_rapim.doc).

Adapun belanja modal terdiri atas tanah, jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi), instalasi, jaringan, bangunan gedung, monumen, alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan alat-alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan, ternak serta tanaman dan belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan.

Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya: pembangunan jembatan dan jalan raya.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya: pembelian kendaraan dinas, pembangunan pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Belanja modal atau yang biasa disebut aset tetap merupakan syarat yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merencanakan kebutuhan daerah dalam anggaran modal, berupa sarana dan prasarana dalam APBD yang dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan prioritas anggaran dan prosedur pelayanan publik yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Belanja modal direalisasikan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut dalam kondisi normal, yaitu dengan cara membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Tapi biasanya pada pemerintahan daerah menggunakan cara membangun sendiri atau membeli. Umumnya proses pembelian yang dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasian serta memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992). Pembuatan keputusan belanja modal membutuhkan perlakuan berbeda dengan belanja untuk konsumsi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah: (1) semua konsekuensi dari belanja modal akan melebihi jangka waktu beberapa periode yang akan datang sehingga membutuhkan pembuatan keputusan operasi tertentu; (2) banyak belanja modal yang *irreversible* karena tidak ada pasar untuk sebagian besar modal pemerintahan (*government capital*); dan (3) harus dilakukan secara hati-hati karena bersifat sangat kompleks (Thibadoux, 1988 dalam Abdullah, 2006).

Menurut Thibadoux (1988) dalam Abdullah (2006), pembuatan keputusan atas belanja modal relatif lebih sulit karena beberapa alasan, diantaranya: (1) manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang, sementara masa depan memiliki ketidakpastian; (2) *benefits* dan *costs* tidak selalu dapat dihitung. Hal ini berarti, senantiasa terjadi eksternalitas terhadap pemanfaatan belanja modal pemerintah; dan (3) *benefits* dan *costs* tidak selalu dapat diperbandingkan (*comparable*) karena terjadi dalam berbagai waktu, misalnya, satu dolar yang dikeluarkan saat ini memiliki makna berbeda dengan satu dolar yang diperoleh pada masa mendatang (*time value of money*).

Belanja pemeliharaan diprioritaskan untuk memelihara sarana dan prasarana umum dalam rangka mempertahankan/meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2002). Belanja Pemeliharaan merupakan belanja yang sengaja dialokasikan dan bertujuan untuk menjaga aset agar selalu siap dipergunakan sesuai dengan kondisi ekonomis (belanja yang mendukung pemeliharaan aset).

Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk belanja pemeliharaan biasa dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam perhitungan biaya depresiasi aset tetap. Hal ini berarti bahwa apabila aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka

alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester.

Beberapa perbedaan dari belanja modal dan belanja pemeliharaan yaitu, belanja pemeliharaan bersifat rutin dan tidak tergantung pada tugas pokok fungsi (tupoksi) pada satuan kerja unit organisasi, sehingga dapat terjadi pada semua unit organisasi pemerintah daerah dikarenakan semuanya memiliki aset tetap. Pada tahap pembuatan keputusan juga terdapat perbedaan, yaitu anggaran operasional dan pemeliharaan melibatkan para eksekutif, bagian anggaran, dan pimpinan dinas, badan, bagian dan kantor, sementara belanja modal terutama infrastruktur sangat tergantung pada masukan dari insinyur, arsitek, dan perencanaan.

2.5 Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan

Proses penyusunan anggaran di pemerintahan daerah mencakup dua komponen belanja yang memiliki siklus yang berbeda, yakni siklus anggaran operasional yang menghasilkan rencana keuangan bagi aktivitas pemerintahan yang berkesinambungan dan siklus anggaran belanja modal, yang merupakan perencanaan untuk mendapatkan peralatan, bangunan, infrastruktur, aset tetap lainnya (Bland & Nunn, 1992). Walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi sebenarnya memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Keduanya memiliki keindependenan satu sama lain pada format dokumen anggaran.

Perbedaan mendasar lainnya yaitu dari pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan. Keduanya melibatkan pihak eksekutif, tetapi pada belanja modal juga dilibatkan insinyur, perencana dan juga arsitek. Sumber pendanaan (*funding*) untuk kedua belanja tersebut juga berbeda. Belanja modal biasanya didasarkan pada *one-time sources*, seperti obligasi dan *grants*, sedangkan anggaran operasi (dalam hal ini belanja pemeliharaan) umumnya berasal dari sumber pendapatan yang bersifat rutin, seperti pajak (*taxes*) dan retribusi (*service charges*). Perbedaan berikutnya adalah *time-frame* yang dimasukkan dalam setiap anggaran. Belanja pemeliharaan biasanya dianggarkan untuk satu tahun anggaran, sementara hampir semua anggaran belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam waktu melebihi satu tahun.

Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap penganggaran di pemerintahan daerah. Pagano berpendapat bahwa perlu untuk menghubungkan diantara keduanya. Dia menyatakan :

Over time, crosswalking of capital budget expenses to operating expenses has eroded, in part due to the separateness of the deliberations on those budgets. State and local governments usually schedule separate budget hearings for the operating budget and for the capital budget... Decisions for each set of outlays, then, are made separately.

Kamensky (1984) yang melakukan penelitian atas kota-kota yang menjadi anggota *National League of Cities* menyatakan bahwa sebanyak 57% kota di Amerika Serikat, tidak mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap *expected life* dari suatu proyek. Menurutny manajer publik perlu memahami lebih jauh biaya total dari belanja modal, bukan hanya pengeluaran untuk konstruksi dan pengadaan.

Thomassen (1990) menyatakan bahwa paling tidak setengah dari *state* yang melaporkan item belanja modal dan non belanja modal secara terpisah, gagal menggabungkan anggarannya untuk melakukan evaluasi secara simultan dan komparatif untuk kedua item belanja tersebut. Dia menyatakan bahwa *the adoption of capital budgeting is a tacit admission that outlays for the purchases of capital are fundamentally different from other government purchases. Their effects linger whereas those of other outlays fade.*

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, seperti belanja pemeliharaan. Namun, bukan berarti belanja modal selalu sebagai penyebab atau *predictor* bagi kenaikan belanja pemeliharaan. Beberapa argumen menyatakan perlunya kehati-hatian dalam melihat hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan, yaitu :

- Pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan tidak seragam karena tergantung apakah belanja modal tersebut merupakan kebijakan menggantikan tenaga manusia (*labor*) dengan mesin (*capital*) atau semata-mata untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah melalui pembangunan fasilitas yang baru.
- Pengaruhnya bervariasi di antara berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, tergantung pada sifat pelayanan tersebut, apakah padat modal atau padat karya.
- Adanya kesenjangan waktu (*lag of time*) antara realisasi belanja modal dan pengaruhnya yang terasa dalam kenaikan atau perubahan dalam belanja pemeliharaan yang berbeda diantara berbagai bentuk pelayanan.
- Hubungan investasi modal kemungkinan ditutupi oleh kehadiran *budget slack* (*excess resources*) atas pelayanan publik, khususnya jika *slack* tersebut digunakan untuk meningkatkan biaya yang muncul dari peningkatan belanja modal.
- Mengukur *magnitude* dan *timing* belanja modal merupakan pekerjaan yang rumit karena tidak lengkapnya data dan tidak terhitungnya kontribusi pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur pemerintah daerah (Bland & Nunn, 1992).

Belanja modal menyebabkan diperolehnya aset tetap (*fixed asset*) pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau ketika *output* telah diperoleh. Hal ini berarti pemerintah daerah akan memiliki penambahan pada aset tetap. Dalam perspektif manajemen keuangan dan akuntansi, selain diperhitungkan *cost* untuk penggunaan aset tersebut dalam bentuk depresiasi, juga harus diperhitungkan *cost*

untuk pemeliharaan aset tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan kegunaannya. Biaya pemeliharaan dikeluarkan secara rutin atau terjadi berulang-ulang setiap tahun (*recurrent*) atas aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Abdullah & Halim, 2006).

Pada pemerintahan di Indonesia, setiap realisasi atas kebijakan yang berhubungan dengan *cost* atau belanja (*expenditure*) harus didasarkan pada peraturan resmi yang disebut Peraturan Daerah (Perda). Perda tentang anggaran daerah (Perda APBD) adalah penentu boleh tidaknya dilakukan pengeluaran dana atau kas untuk membayar biaya-biaya, termasuk biaya untuk memperoleh aset tetap (belanja modal) maupun biaya untuk memelihara aset tetap (belanja pemeliharaan). APBD merupakan rencana keuangan untuk mendapatkan aset tetap dan pendanaan untuk pemeliharaan aset tersebut kedepan.

Pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa belanja pemeliharaan harus dialokasikan berdasarkan estimasi atas kondisi keseluruhan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah. Bahkan dalam peraturan yang harus dipatuhi oleh Pemda ini, belanja pemeliharaan terdapat dalam dua jenis belanja, yakni dalam belanja administrasi umum (BAU) dan dalam belanja operasional dan pemeliharaan (BOP). Belanja pemeliharaan dalam BAU lebih bersifat rutin atau terjadi secara kontinyu, sementara dalam BOP merupakan kegiatan (*insidental*). Namun tidak ada penjelasan lebih jauh batas antara kedua objek belanja pemeliharaan ini.

Untuk di luar Indonesia, beberapa studi yang menganalisa hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan telah dilakukan. Bland & Nunn (1992) menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam proses pembuatan keputusan pengalokasian antara anggaran belanja modal dengan anggaran belanja pemeliharaan. Perbedaan itu terjadi karena sifat kedua belanja yang berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja pemeliharaan bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2006) pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, menunjukkan bahwa belanja modal 2003 tidak mempunyai korelasi dengan belanja pemeliharaan 2003 untuk wilayah pulau Jawa, namun mempunyai korelasi positif bagi wilayah luar pulau Jawa, dan hubungan antara belanja modal 2003 dan belanja pemeliharaan 2004 mempunyai korelasi yang cukup kuat baik di pulau Jawa maupun wilayah luar pulau Jawa.

Selanjutnya hasil analisis belanja modal 2004 dan belanja pemeliharaan 2004 menunjukkan bahwa di daerah pulau Jawa dan luar pulau Jawa tidak memiliki korelasi, begitu juga untuk total selisih belanja modal dan selisih belanja pemeliharaan tidak memiliki korelasi. Diduga penyebabnya pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal tidak dibarengi dengan alokasi anggaran untuk belanja pemeliharaan.

2.6 Hipotesis Penelitian

Temuan Bland & Nunn (1992), memberikan bukti empiris yang cukup tentang hubungan antara belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan. Meskipun para manajer sektor publik, termasuk pemerintahan, menyadari bahwa realisasi belanja modal memiliki konsekuensi akan adanya belanja pemeliharaan, namun dalam pembuatan keputusan pengalokasian dan belanja modal merupakan hal yang terpisah. Hal ini menunjukkan seolah-olah tidak ada hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan.

Kamensky (1984) berargumen perlunya menghubungkan keputusan belanja modal dengan keputusan belanja operasional. Karo-karo (2006) justru menemukan bahwa di Indonesia tidak ada hubungan belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan. Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim (2006) menemukan bahwa belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja operasional dan pemeliharaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2006) menyatakan bahwa belanja modal 2003 tidak mempunyai korelasi dengan belanja pemeliharaan 2003 untuk wilayah pulau Jawa, namun mempunyai korelasi positif bagi wilayah luar pulau Jawa, dan hubungan antara belanja modal 2003 dan belanja pemeliharaan 2004 mempunyai korelasi yang cukup kuat baik di pulau Jawa maupun wilayah luar pulau Jawa.

Selanjutnya hasil analisis belanja modal 2004 dan belanja pemeliharaan 2004 menunjukkan bahwa di daerah pulau Jawa dan luar pulau Jawa tidak memiliki korelasi, begitu juga untuk total selisih belanja modal dan selisih belanja pemeliharaan tidak memiliki korelasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka perlu dilakukan pembuktian empiris lebih jauh untuk konteks pemerintah daerah di wilayah Sumbagsel. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji dapat dinyatakan sebagai berikut :

H₁: Belanja modal berhubungan dengan belanja pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumbagsel

H₂ : Belanja modal tahun sebelumnya (2005) berhubungan dengan belanja pemeliharaan tahun berikutnya (2006) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumbagsel.

H₃: Terdapat perbedaan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kota dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten di wilayah Sumbagsel.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif yang akurat dan aktual serta berkaitan erat dengan masalah yang diteliti (Indrianto dan Supomo, 2002). Penelitian ini dilakukan dengan menguji dua variabel (*analisis bivariate*) yaitu belanja langsung fisik (belanja modal) dan belanja pemeliharaan.

3.2 Populasi dan Data Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003). Populasi penelitian ini adalah 50 Pemerintah Daerah (Pemda) se Sumbagsel baik kabupaten maupun kota dari tahun 2005 sampai dengan 2006.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 Pemerintah Daerah (Pemda) se Sumbagsel yang dipilih, baik kabupaten maupun kota dari tahun 2005 sampai dengan 2006.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan dengan tujuan dan masalah tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Elemen populasi yang diambil sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan pertimbangan. Faktor ketersediaan data dan Faktor kepraktisan (kemudahan, kecepatan waktu dan biaya yang terjangkau) merupakan pertimbangan pokok dalam pengambilan sampel secara tidak acak ini. Adapun karakteristik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah

1. Seluruh sampel penelitian yang berupa Pemerintah Daerah (Pemda) se Sumbagsel yang dipilih pada laporan realisasi APBD untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, telah sesuai dengan tata cara penyusunan APBD yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, sehingga dapat diperbandingkan.
2. Ketersediaan data, yaitu merupakan data belanja modal dan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi APBD yang telah dipublikasikan dalam situs Dirjen Perimbangan Keuangan (DjKP) dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2006.

Adapun sampel yang diambil berdasarkan karakteristik di atas berjumlah 18 sampel untuk tiap tahun yang dianalisis, yang terdiri dari: 9 kabupaten dan 9 kota di wilayah Sumbagsel. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian
Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota
Wilayah Sumbagsel Tahun 2005-2006

No	Kabupaten dan kota	Tahun yang diteliti	
		2005	2006
1	Kota Pangkal Pinang	√	√
2	Kota Bengkulu	√	√
3	Kota Bandar Lampung	√	√
4	Kota Metro	√	√
5	Kota Lubuk Linggau	√	√
6	Kota Pagar Alam	√	√
7	Kota Prabumulih	√	√
8	Kota Palembang	√	√
9	Kota Jambi	√	√
10	Kabupaten Bangka	√	√
11	Kabupaten Belitung	√	√
12	Kabupaten Kaur	√	√
13	Kabupaten Tulang Bawang	√	√
14	Kabupaten Lampung Tengah	√	√
15	Kabupaten Lampung Selatan	√	√
16	Kabupaten Ogan Komering Ilir	√	√
17	Kabupaten Musi Banyuasin	√	√
18	Kabupaten Sarolangun	√	√

Tanda √ : Data sudah tersedia

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini dapat diperoleh dari: studi kepustakaan, buku-buku literatur, majalah, jurnal, internet serta laporan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Dalam Penelitian ini data belanja modal dan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Wilayah Sumatera Bagian Selatan diperoleh dari internet situs Dirjen Perimbangan Keuangan (djpk), dengan alamat situs: www.djpk.depkeu.go.id.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk lebih jelasnya unsur-unsur yang dipergunakan dalam penelitian ini secara operasional adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan

aset tak berwujud yang ditetapkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Ukuran belanja modal didapatkan dari laporan realisasi APBD dimana diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal (BM).

2. Belanja pemeliharaan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah belanja yang sengaja dialokasikan dan bertujuan untuk menjaga aset agar selalu siap dipergunakan sesuai dengan kondisi ekonomis (belanja yang mendukung pemeliharaan aset). Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan gedung, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Ukuran belanja pemeliharaan didapatkan dari laporan realisasi APBD dimana diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan (BP).

3.6 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, uji statistik dilakukan dengan menggunakan alat bantu *SPSS 12.0 For Windows*.

a. Analisis Deskriptif

Teknik analisis yang bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan (Supranto, 1997). Pada penelitian ini, analisis deskriptif berfungsi untuk menentukan nilai tertinggi (*maximum*) dan juga nilai terendah (*minimum*) dari hasil analisa belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumbagsel.

b. Analisis Koefisien Korelasi/Korelasi Pearson

Data dianalisis dengan alat statistik koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan suatu ukuran variabel yang menggambarkan kekuatan hubungan linear antara dua gugus variabel (Soetjipto dkk, 1999). Pada penelitian ini, analisis koefisien korelasi berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumbagsel. Analisis ini juga berfungsi untuk menentukan hasil hipotesis pertama dan kedua.

c. Uji Beda

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Independent Sample t-test*, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada wilayah kota dan wilayah kabupaten di wilayah Sumbagsel. Pada penelitian ini, uji beda berfungsi untuk menentukan hasil hipotesis ketiga.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Sampel

Deskriptif statistik merupakan bagian dari analisis data yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan. Gambaran atau deskripsi suatu data

tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) maksimum dan minimum dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se-Sumbagsel baik kabupaten dan kota tahun 2005-2006, yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga didapat 36 data yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hasil pengujian tersebut ditemukan dari 9 kota dan 9 kabupaten yang terdiri dari dua tahun dan merupakan sampel dari kabupaten/kota yang terwakili dari propinsi di Sumbagsel (Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan Sumatera Selatan). Berdasarkan hasil pengujian data lewat bantuan SPSS ditemukan gambaran data sebagai berikut:

4.1.1 Pemerintah Kota Wilayah Sumbagsel

Hasil analisis deskriptif yang dilakukan untuk Pemerintah Kota di wilayah Sumbagsel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2005 dan Tahun 2006

Belanja Modal (BM) tahun 2005 untuk wilayah Sumbagsel dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa yang terendah adalah Pemerintah Kota Metro sebesar Rp27.240.650.000,- dan tertinggi Kota Palembang Rp124.132.830.000,- sedangkan belanja modal tahun 2006 yang tertinggi adalah Kota Palembang dengan total Rp224.112.460.000,- dan terendah Kota Metro sebesar Rp44.133.350.000,-

2) Belanja Pemeliharaan Tahun 2005 dan Tahun 2006

Untuk Belanja Pemeliharaan (BP) tahun 2005, yang tertinggi adalah Kota Palembang dengan total Rp60.948.650.000,- dan yang terendah adalah Kota Prabumulih dengan total Rp3.052.280.000,- sedangkan belanja pemeliharaan tahun 2006, yang tertinggi adalah Kota Palembang sebesar Rp105.641.380.000,- dan yang terendah adalah Kota Pangkal Pinang dengan total Rp6.096.080.000,-

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pemerintah Kota

	N	Minimum	Maximum
BMKOTA2005	9	27240.65	124132.83
BPKOTA2005	9	3052.28	60948.65
BMKOTA2006	9	44133.35	224112.46
BPKOTA2006	9	6096.08	105641.38
Valid N (listwise)	9		

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (diolah dengan SPSS 12)

4.1.2 Pemerintah Kabupaten Wilayah Sumbagsel

Hasil analisis deskriptif yang dilakukan untuk Pemerintah Kabupaten di wilayah Sumbagsel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2005 dan Tahun 2006

Belanja Modal (BM) tahun 2005 untuk wilayah Sumbagsel menunjukkan bahwa yang terendah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur sebesar Rp24.878.130.000,- dan yang tertinggi Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp237.130.610.000,- sedangkan belanja modal tahun 2006 yang tertinggi adalah Kabupaten Musi Banyuasin dengan total Rp396.432.140.000,- dan yang terendah adalah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp60.748.550.000,-

2) Belanja Pemeliharaan tahun 2005 dan Tahun 2006

Untuk Belanja Pemeliharaan (BP) tahun 2005, yang tertinggi adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan total Rp54.521.360.000,- dan yang terendah adalah Kabupaten Bangka dengan total Rp3.117.870.000,-. Belanja pemeliharaan tahun 2006, yang tertinggi nilai realisasinya adalah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp111.575.830.000,- dan yang terendah Kabupaten Kaur Rp2.359.030.000,-

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pemerintah Kabupaten

	N	Minimum	Maximum
BMKAB2005	9	24878.13	237130.61
BPKAB2005	9	3117.87	54521.36
BMKAB2006	9	60748.55	396432.14
BPKAB2006	9	2359.03	111575.83
Valid N (listwise)	9		

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (diolah dengan SPSS 12)

4.2 Analisis Hasil Koefisien Korelasi/Korelasi Pearson

Pengujian untuk melihat hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan adalah dengan alat statistik korelasi. Hasil pengujian yang dilakukan pada Pemerintah di wilayah Sumbagsel diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pemerintah Kota Wilayah Sumbagsel

1) Hubungan Belanja Modal 2005 dengan Belanja Pemeliharaan 2005

Berdasarkan hasil analisis korelasi *pearson* yang dilakukan terhadap keterkaitan hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan wilayah kota se-Sumbagsel pada tahun 2005, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hubungan Belanja Modal 2005 dan Belanja Pemeliharaan 2005 Pemerintah Kota

Correlations

		BP2005	BM2005
Pearson Correlation	BP2005	1,000	,926
	BM2005	,926	1,000
Sig. (1-tailed)	BP2005	.	,000
	BM2005	,000	.
N	BP2005	9	9
	BM2005	9	9

Sumber : Hasil Penelitian 2008, diolah.

Dengan menggunakan data yang langsung diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota se-sumbagsel, diketahui bahwa terdapat korelasi antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada tahun 2005 sebesar 0,926. Artinya, pemerintah daerah telah mampu memprediksi alokasi belanja pemeliharaan untuk aset yang dimiliki pada awal/pertengahan tahun anggaran berjalan. Perencana anggaran juga telah bijak dalam menganggarkan belanja, dimana aset yang telah dimiliki dapat terus dioptimalkan dengan perawatan yang relevan guna menambah umur manfaat aset sehingga dapat mencegah terjadinya inefisiensi.

2) Hubungan Belanja Modal 2006 dengan Belanja Pemeliharaan 2006

Berdasarkan hasil analisis korelasi *pearson* yang dilakukan terhadap keterkaitan hubungan belanja modal 2006 dengan belanja pemeliharaan 2006 di wilayah pemerintah kota se-Sumbagsel, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hubungan Belanja Modal 2006 dan Belanja Pemeliharaan 2006 Pemerintah Kota

Correlations

		BP2006	BM2006
Pearson Correlation	BP2006	1,000	,985
	BM2006	,985	1,000
Sig. (1-tailed)	BP2006	.	,000
	BM2006	,000	.
N	BP2006	9	9
	BM2006	9	9

Sumber : Hasil Penelitian 2008, diolah.

Dengan menggunakan data yang langsung diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota se-sumbagsel, diketahui bahwa terdapat korelasi antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada tahun 2006 sebesar 0,985. Artinya, pemerintah daerah telah mampu memprediksi alokasi belanja pemeliharaan untuk aset yang dimiliki pada awal/pertengahan tahun anggaran berjalan. Perencana anggaran juga telah bijak dalam menganggarkan belanja, dimana aset yang telah dimiliki dapat terus dioptimalkan dengan perawatan yang relevan guna menambah umur manfaat aset sehingga dapat mencegah terjadinya inefisiensi.

3) Hubungan Belanja Modal 2005 dengan Belanja Pemeliharaan 2006

Dengan menggunakan data yang langsung diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemeliharaan pemerintah kota se-sumbagsel, untuk belanja modal 2005 dan belanja pemeliharaan 2006, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hubungan Belanja Modal 2005 dan Belanja Pemeliharaan 2006 Pemerintah Kota

Correlations

		BM2005	BP2006
BM2005	Pearson Correlation	1	,734*
	Sig. (2-tailed)	.	,024
	N	9	9
BP2006	Pearson Correlation	,734*	1
	Sig. (2-tailed)	,024	.
	N	9	9

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Penelitian 2008, diolah.

Hal ini berarti bahwa terdapat korelasi antara belanja modal tahun 2005 dengan belanja pemeliharaan tahun 2006 sebesar 0,734. pada Pemerintah Kota di Wilayah Sumbagsel. Hal ini dikarenakan aparat pemerintah daerah kota telah mampu memprediksi nilai belanja pemeliharaan untuk aset tetap yang telah dimiliki pada tahun sebelumnya. Perencana anggaran dalam hal ini juga telah memiliki kemampuan memahami perencanaan strategik dan penerapan aturan yang berlaku.

b. Pemerintah Kabupaten Wilayah Sumbagsel

1) Hubungan Belanja Modal 2005 dengan Belanja Pemeliharaan 2005

Dengan menggunakan data yang langsung diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten se-Sumbagsel, untuk

belanja modal 2005 dan belanja pemeliharaan 2005, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hubungan Belanja Modal 2005 dan Belanja Pemeliharaan 2005 Pemerintah Kabupaten

Correlations

		BP2005	BM2005
Pearson Correlation	BP2005	1,000	,949
	BM2005	,949	1,000
Sig. (1-tailed)	BP2005	.	,000
	BM2005	,000	.
N	BP2005	9	9
	BM2005	9	9

Sumber : Hasil Penelitian 2008, diolah.

Terdapat korelasi antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada tahun 2005 sebesar 0,949. Artinya, pemerintah daerah telah mampu memprediksi alokasi belanja pemeliharaan untuk aset yang dimiliki pada awal/pertengahan tahun anggaran berjalan. Perencana anggaran juga telah bijak dalam mengalokasikan belanja, dimana aset yang telah dimiliki dapat terus dioptimalkan dengan perawatan yang relevan guna menambah umur manfaat aset sehingga dapat mencegah terjadinya inefisiensi.

2) Hubungan Belanja Modal 2006 dengan Belanja Pemeliharaan 2006

Dengan menggunakan data yang langsung diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten se-Sumbagsel, untuk belanja modal 2006 dan belanja pemeliharaan 2006, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hubungan Belanja Modal 2006 dan Belanja Pemeliharaan 2006 Pemerintah Kabupaten

Correlations

		BP2006	BM2006
Pearson Correlation	BP2006	1,000	,491
	BM2006	,491	1,000
Sig. (1-tailed)	BP2006	.	,090
	BM2006	,090	.
N	BP2006	9	9
	BM2006	9	9

Sumber : Hasil Penelitian 2008, diolah.

Dengan menggunakan data yang langsung diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten se-sumbagsel, diketahui bahwa terdapat korelasi antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada tahun 2006 sebesar 0,491. Hal ini dikarenakan aparat pemerintah daerah kota telah mampu memprediksi nilai belanja pemeliharaan untuk aset tetap yang telah dimiliki pada tahun sebelumnya. Perencana anggaran dalam hal ini juga telah memiliki kemampuan memahami perencanaan strategik dan penerapan aturan yang berlaku.

3) Hubungan Belanja Modal 2005 dengan Belanja Pemeliharaan 2006

Dengan menggunakan data yang langsung diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten se-Sumbagsel, untuk belanja modal 2005 dan belanja pemeliharaan 2006, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hubungan Belanja Modal 2005 dan Belanja Pemeliharaan 2006 Pemerintah Kabupaten

Correlations

		BM2005	BP2006
BM2005	Pearson Correlation	1	,037
	Sig. (2-tailed)	.	,924
	N	9	9
BP2006	Pearson Correlation	,037	1
	Sig. (2-tailed)	,924	.
	N	9	9

Sumber : Hasil Penelitian 2008, diolah.

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8 di atas, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,037. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal tahun 2005 tidak berkorelasi dengan belanja pemeliharaan tahun 2006 pada Pemerintah Kabupaten di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Hal ini disebabkan aparat pemda belum mampu memprediksi nilai belanja pemeliharaan untuk aset yang telah dimiliki pada tahun sebelumnya. Untuk itu, aparat pemda perlu lebih meningkatkan kemampuan dalam memahami perencanaan strategik, guna lebih memiliki daya prediksi untuk mengalokasikan kebutuhan belanja pemeliharaan bagi perawatan dan perbaikan aset tetap yang ada untuk tahun selanjutnya.

4.3. Uji Beda

Untuk membuktikan hipotesis ketiga digunakan uji beda (*independent sample t-test*). Hal ini karena terdapat dua kategori *control variables*, yakni pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah:

- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($\alpha 0,05$), maka terdapat perbedaan nyata antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pemerintah kota dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan pemerintah kabupaten di wilayah Sumbagsel.
- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($\alpha 0,05$), maka tidak terdapat perbedaan nyata antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pemerintah kota dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan pemerintah kabupaten di wilayah Sumbagsel.

Hasil pengujian *independent sample t-test* dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji Beda Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Wilayah Sumbagsel Tahun 2005 dan 2006

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
BM2005	Equal variances assumed	1,416	,251	-,313	16	,758	-7477,623	23857,764	-58053,8	43098,58
	Equal variances not assumed			-,313	10,730	,760	-7477,623	23857,764	-60149,6	45194,40
BM2006	Equal variances assumed	,078	,783	-,662	16	,518	-5425,008	8200,6867	-22809,7	11959,67
	Equal variances not assumed			-,662	15,697	,518	-5425,008	8200,6867	-22837,0	11986,99
BP2005	Equal variances assumed	,586	,455	-,399	16	,695	-15606,17	39116,385	-98529,2	67316,86
	Equal variances not assumed			-,399	12,261	,697	-15606,17	39116,385	-100633	69420,30
BP2006	Equal variances assumed	,017	,897	-,201	16	,843	-3118,744	15491,943	-35960,2	29722,71
	Equal variances not assumed			-,201	15,996	,843	-3118,744	15491,943	-35960,9	29723,43

Sumber : Hasil Penelitian 2008, diolah.

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana terlihat pada Tabel 4.9 di atas, diperoleh perbandingan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel, dengan kesimpulan bahwa nilai t-hitung masing-masing variabel yakni belanja modal dan belanja pemeliharaan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten tahun 2005 dan tahun 2006 (0,758; 0,518; 0,695; dan 0,843) lebih kecil daripada t-tabel 1,734; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: pada tahun 2005 dan 2006 belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten se-Sumbagsel tidak berbeda secara nyata.

Hal ini dikarenakan adanya kelompok daerah kabupaten kota yang kaya dan miskin. Dimana kemungkinan salah satu penyebabnya yaitu dikarenakan adanya perbedaan potensi sumber daya alam pada kabupaten ataupun kota yang dimaksud.

V. PENUTUP

5.1 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara alokasi belanja modal dan belanja pemeliharaan baik pada pemerintah kabupaten maupun kota di wilayah Sumbagsel. Disamping itu juga untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan antara pemerintah kota dengan pemerintah kabupaten di wilayah Sumbagsel.

Hasil pengolahan dan analisis data untuk pengujian hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi antara belanja modal 2005 dengan belanja pemeliharaan 2005 di wilayah kota sebesar 0,926.
2. Terdapat korelasi antara belanja modal 2006 dengan belanja pemeliharaan 2006 di wilayah kota sebesar 0,985.
3. Terdapat korelasi antara belanja modal 2005 dengan belanja pemeliharaan 2006 di wilayah kota sebesar 0,734.
4. Terdapat korelasi antara belanja modal 2005 dengan belanja pemeliharaan 2005 di wilayah kabupaten sebesar 0,949.
5. Terdapat korelasi antara belanja modal 2006 dengan belanja pemeliharaan 2006 di wilayah kabupaten sebesar 0,491.
6. Tidak terdapat korelasi antara belanja modal 2005 dengan belanja pemeliharaan 2006 di wilayah kabupaten sebesar 0,037.
7. Tidak terdapat perbedaan nyata antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pemerintah kota dengan pemerintah kabupaten pada tahun 2005 dan tahun 2006 di wilayah Sumbagsel yang dibuktikan dengan nilai t-hitung < t-tabel 1,734.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Pemerintah daerah selaku penyusun APBD harus dapat menyusun APBD dengan lebih baik sehingga daerah dapat lebih menaksir setiap jumlah belanja yang dikeluarkan pada tahun berjalan.
2. Pemerintah pusat perlu memberikan payung hukum yang jelas dan tegas tentang pengertian belanja pemeliharaan baik rutin/berkala maupun rehabilitasi sedang/berat, sehingga tidak menyulitkan Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki kekurangan-kekurangan yang mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat diperbaiki:

1. Sampel dan periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada daerah baik kabupaten maupun kota di wilayah Sumbagsel tahun 2005-2006 sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi daerah di luar wilayah Sumbagsel.
2. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD tahun 2005-2006 untuk wilayah Sumbagsel, namun tidak semua Pemerintah Kabupaten/Kota telah menggunakan Kepmendagri No.29 Tahun 2002.
3. Belanja modal yang diteliti dalam penelitian ini tidak membedakan jenis aset tetap yang dimiliki.

5.4 Rekomendasi Untuk Penelitian Lanjutan

1. Untuk penelitian dan studi berikutnya perlu mengikutsertakan data tahun selanjutnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya perlu melihat klasifikasi belanja modal baik berupa: jenis aset tetap, umur dan masa pemeliharaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2006. Hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten /kota di Indonesia periode 2003-2004. Program Magister Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. *Tesis*.
- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2006. Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 Nomor. 2 November 2006, hal 17-35.
- Arif, Bachtiar., Muchlis, dan Iskandar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah 2001*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Bland, Robert dan Samuel Nunn. 1992. The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets, *Public Budgeting & Finance (Summer)*: 32-47.
- Dwiyanto, Agus. *et.al.* 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- , 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- <http://www.djpk.go.id>.
- http://www.mail-archive.com/perbendaharaanjateng/makalah_rapim.doc.
- Husein Umar, 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Kamensky, Jhon M. 1984. Budgeting for state and local infrastructure: Developing a strategy. *Public Budgeting and Finance (Autumn)*: 3-17.
- Karo-Karo, Syukur Selamat. 2006. Hubungan belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa. Program Magister Sains-Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada. *Tesis*.
- KSAP. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Bandung: Fokusmedia
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pagano, Michael. 1984. Notes on Capital Budgeting. *Public Budgeting & Finance* 4 (Autumn): 31-40.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

- , 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- , 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
- , 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Soetjipto, Widyono.dkk. 1999. *Teknik Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Thomassen, Henry. 1990. Capital Budgeting for a state. *Public Budgeting & Finance* 10 (Winter): 72-86.